

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar**

##### **2.1.1 Kebijakan Publik**

Thomas R. Dye mengartikan jika kebijakan publik merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan alasan sebuah peraturan harus dilaksanakan dan manfaat untuk kehidupan masyarakat harus menjadi tinjauan yang menyeluruh sehingga peraturan memiliki kegunaan yang besar untuk masyarakat dan tidak mengakibatkan kerugian dan disanalah pembuat kebijakan harus bijaksana dalam membentuk sebuah kebijakan. Sedangkan David Easton mengatakan jika kebijakan publik merupakan pemberian norma yang sah untuk semua masyarakat (Anggara, 2014, hal. 35).

##### **a. Kriteria Penentuan Kebijakan Publik**

Said Zainal Abidin, menyatakan jika kebijakan publik memiliki perhatian utama yang berbeda untuk di proses. Hal tersebut ditetapkan dari proses penyaringan dari beberapa kriteria. Adapun kriteria tersebut antara lain: (Anggara, 2014, hal. 171):

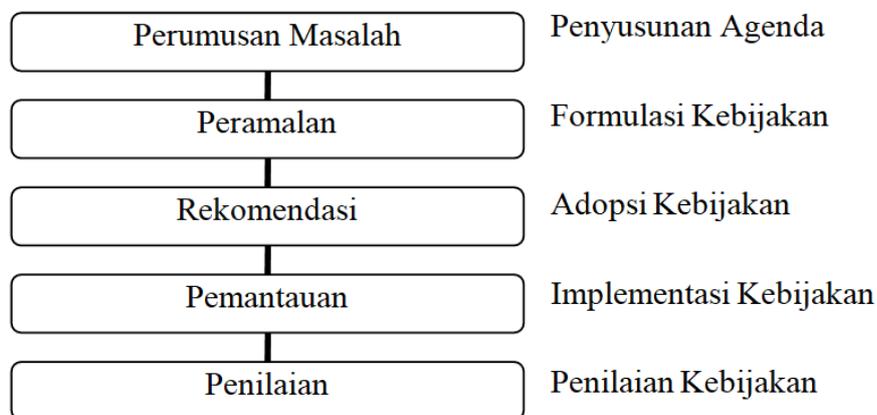
1. Efektivitas, membuat alternatif peraturan dengan cara memperkirakan suatu alternatif tujuan yang akan diperoleh sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan;
2. Efisien, untuk mencapai sasaran yang ditentukan harus menggunakan biaya yang sesuai;
3. Cukup, mencapai tujuan sebuah kebijakan melalui sumber daya yang telah tersedia;
4. Tidak memihak atau tidak diskriminatif;

5. Terjawab, tujuan dengan adanya sebuah kebijakan adalah untuk menjawab apa yang masyarakat perlukan dalam suatu masalah.

**b. Proses Pembuatan Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan publik. Proses tersebut menggambarkan kegiatan yang terus terjadi di setiap waktu. Semua proses saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain, sehingga ketika ada kesalahan dalam salah satu prosesnya maka akan berkaitan dengan proses sebelumnya. Menurut William N. Dunn kegiatan yang terdapat ketika menerapkan prosedur tinjauan kebijakan yang sesuai pada tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan, seperti yang diuraikan dalam Bagan 2.1.1 yang merupakan beberapa cara penerapan analisis kebijakan yang menjadikan proses pembuatan dan kinerja berjalan lebih baik (Anggara 2014:172–173).

**Bagan 2.1.1 Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-tipe Pembuatan Kebijakan**



*Sumber: Sahya Anggara (2014: 172)*

1. Membantu untuk memperoleh masukan yang tidak terlihat atau terdengar, memperkirakan penyebabnya, menyusun tujuan yang menggabungkan pandangan yang berbeda dan menyusun kesempatan-kesempatan timbulnya kebijakan yang baru melalui perumusan kebijakan.

2. Peramalan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan peraturan terkait masalah apa yang kemungkinan terjadi pada masa depan sebagai dampak dari diperolehnya cara lain, termasuk tidak melaksanakan kebijakan. Hal ini dilaksanakan diproses formulasi kebijakan.
3. Rekomendasi menghasilkan informasi yang sesuai dengan peraturan terkait tujuan atau dana dari bermacam alternatif ataupun cara, yang berdampak pada masa depan yang sudah di perkirakan melalui peramalan untuk membantu dalam pengambilan keputusan di tahap adopsi kebijakan.
4. Pemantauan memberikan informasi tentang akibat yang diperoleh dari peraturan yang telah ditetapkan. Ini membantu pembuat kebijakan dalam proses implementasi kebijakan dengan memakai berbagai macam indikator sebagai pedoman ataupun acuan.
5. Penilaian memberikan pemahaman terkait perbedaan antara kinerja dengan peraturan yang diterapkan dan yang diciptakan. Selain menciptakan kesimpulan terkait masalah, evaluasi juga dapat menyumbang pada kelompok dan kritik kepada norma yang mendasari peraturan, membantu dalam penyesuaian serta perumusan masalah.

### **2.1.2 Pemerintahan Daerah**

Menurut Harris pemerintahan daerah merupakan pemerintahan yang kegiatannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah dipilih secara demokrasi dengan mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan daerah diberika wewenang, diskersi, atau kebebasan dalam mengambil keputusan serta tanggung jawab tanpa di kontrol dengan wewenang yang berada di atasnya (Nurcholis et al., 2017, hal. 1.26).

Secara orisinal pelaksanaan pemerintahan daerah didasari oleh pertimbangan sebagai berikut ini (Nurcholis et al., 2017, hal. 1.37-1.40):

- 1) Sistem sosial, politik, dan berbeda disetiap daerah, maksudnya sebelum terbentuknya negara nasional setiap daerah sudah memiliki sistem sosial,

politik dan budaya yang telah tumbuh dan berkembang di kehidupan bermasyarakatnya. Sebagai contoh masyarakat Kepulauan Riau yang berbeda dengan masyarakat Sumatera Utara, begitupun antar daerah yang lain.

- 2) Sebagai cara untuk membuat masyarakat merasakan pelayanan yang diberika, artinya pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengendalikan dan menangani urusan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan pendapatnya, karena jakan dilaksanakan dengan tatanan birokrasi yang panjang dan kompleks.
- 3) Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien, maksudnya jika proses administrasi pemerintahan hanya diurus oleh pemerintahan pusat maka akan menciptakan tatanan dan rantai kendali yang panjang. Tahap koordinasi akan berjalan lebih mudah dan penilaian akan lebih efektif jika memiliki rentang kendali yang tidak panjang karena pertanggungjawabannya terletak di daerah yang bersangkutan..

Sebelum di amandemen kebijakan yang mengatur terkait pemerintahan daerah adalah Bab VI Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Inti dari pasal ini bahwa negara Indonesia terdapat Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi daerah besar dan daerah kecil perlu melihat (Nurcholis et al., 2017, hal. 2.1):

- a) Dasar permusyawaratan, artinya demokrasi haru menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah karena memiliki ciri utama berupa adanya permusyawaratan dalam dewan perwakilan rakyat;
- b) Keistimewaan asal-usul dalam derah, artinya daerah-daerah yang berada di masa Belanda adalah daerah swapraja atau lebih dikenal dengan sebutan *zelfbesturende lanschappen* dan kesatuan masyarakat hukum pribumi, tidak dapat dihapuskan oleh pemerintah daerah seperti Marga yang disebut *volks-gemeenschappen* atau *zelfstandigemeenschappen*.

### **2.1.3 Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan**

Kewajiban Pemerintah Daerah adalah sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah selaku lembaga eksekutif daerah. Dalam melaksanakan kebijakan atau peraturan daerah perlu adanya koordinasi antardinas dan pelaksana teknis yang baik. Suatu arah tindakan yang akan dilaksanakan menjadi lebih jelas jika memiliki koordinasi didalamnya, karena koordinasi dapat membentuk keselarasan dalam tindakan dan cara yang akan digunakan serta membuat pembagian tugas antar dinas dan lembaga teknis menjadi lebih jelas. Dalam pemerintah daerah, kepala daerah merupakan pihak yang berperan sebagai koordinator utama dalam melaksanakan koordinasi, sedangkan sekretaris daerah yang akan menjalankan secara operasional (Nurcholis et al., 2017, hal. 7.13-7.14). Agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan:

- a. Adanya keterkaitan anatar kebijakan dasar dengan keputusan pelaksanaannya;
- b. Bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat didalamnya;
- c. Adanya sikap yang konsisten antara semua pihak dalam melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan dan tugasnya masing-masing;
- d. Adanya perilaku semua aktor kebijakan yang taat terhadap ketentuan dan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya;
- e. Kebijakan ataupun peraturan serta pelaksanaannya harus jelas.

### **2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik**

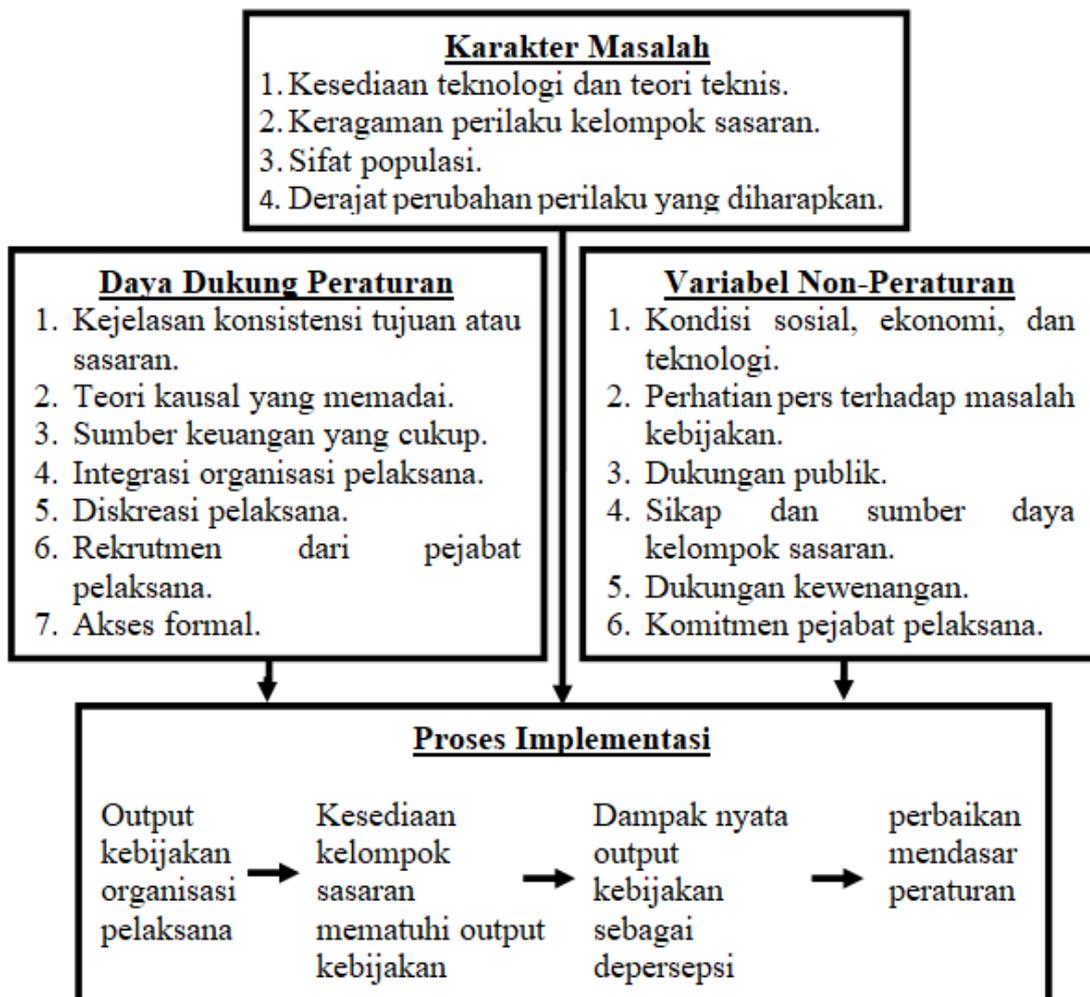
Grindle menyatakan jika implementasi kebijakan sebenarnya bukan hanya tentang saling terhubungnya aturan penjelasan dari keputusan-keputusan politik kedalam tatanan cara yang rutin dilakukan menggunakan saluran birokrasi, tetapi jauh lebih luas dibandingkan itu, implementasi kebijakan berbicara tentang masalah konflik, dan memutuskan suatu kebijakan yang dilaksanakan akan berdampak pada siap (Anggara, 2012, hal. 12). Sedangkan menurut Chief J. O.

Udoji seorang pakar kebijakan asal Afrika mengatakan bahwa dibandingkan dengan pembuatan kebijakan, maka pelaksanaan dari suatu kebijakan merupakan hal yang lebih penting sebab suatu kebijakan hanya akan menjadi sebuah angan semata jika tanpa adanya pelaksanaan (Wahab, 2017, hal. 126).

**a. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan**

Terdapat tiga faktor yang dapat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (Anggara, 2014, hal. 257) diantaranya adalah: 1) karakteristik dari masalah, 2) karakteristik kebijakan/undang-undang, 3) lingkungan.

**Bagan 2.1.2 Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier**



*Sumber: Sahya Anggara (2014: 258)*

### **b. Faktor yang Membuat Implementasi Kebijakan Gagal**

Walaupun suatu kebijakan telah dibuat dengan sangat baik, namun hal ini tidak dapat meluputkan proses pelaksanaannya berjalan tanpa adanya kegagalan. Maka dari itu berikut ini faktor kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan yang disebabkan (Nurcholis et al., 2017, hal. 7.15-7.16):

1. Kebijakan yang dibuat penjelasannya tidak rinci. Yang berarti jika pembuatan peraturan tidak dijelaskan secara detail sehingga pelaksana peraturan tidak mengerti dan menyimpulkan pemikirannya sendiri;
2. Lembaga atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan publik tidak tepat;
3. Adanya tujuan yang tidak searah;
4. Upah tambahan yang tidak menarik, artinya pelaksana peraturan beranggapan jika upah tambahan guna pelaksanaan peraturan tidak sesuai dengan usahanya;
5. Keterbatasan kemampuan;
6. Sumber daya administrasi yang terbatas; dan
7. Kegagalan dalam menjalin komunikasi.

### **2.1.5 Penilaian Kinerja Program**

Umumnya, dalam menilai kinerja dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama seperti yang telah dikemukakan oleh Martin dan Kettner (1996), yaitu: (1) pendekatan perilaku, pendekatan yang bersifat *quality of task oriented behavior*, dimana pendekatan ini memberikan pemahaman terkait perilaku yang relevan ataupun berhubungan langsung dalam pelaksanaan tanggungjawab seseorang. Hal utama yang sering dipakai ketika menilai dengan cara tersebut adalah sumber daya yang berupa uang, waktu, tenaga serta energi yang dikeluarkan, ketika proses dibandingkan dengan hasil yang telah diperoleh atau juga disebut dengan kriteria efisiensi; (2) pendekatan hasil, pendekatan ini bersifat *result oriented criteria*, pendekatan ini memberikan pelajaran mengenai kesesuaian antara hasil dan kualitas yang diinginkan oleh mereka yang membutuhkan dan sudahkah penyaluran dilakukan secara merata kepada yang membutuhkan dan hasil yang

sesuai dengan tujuan atau rencana awal inilah yang dikenal dengan efektifitas (Keban 2019:259–264).

### **2.1.6 Evaluasi Kebijakan**

(Nurcholis et al., 2017, hal. 7.21-7.23) dalam tahapan pembuatan kebijakan, evaluasi kebijakan adalah tahap yang terakhir dilakukan dan merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, outputs, hingga outcomes dari peraturan pemerintah pusat maupun daerah. Dari tahap evaluasi inilah dapat menarik kesimpulan sudahkah kebijakan yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan rencana awal. Dan dari tahap evaluasi pulalah dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai sudah sejauh mana dan jika gagal maka dapat mengidentifikasi mengapa kebijakan tersebut bisa gagal. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja dan tanggungjawab para pelaksana kebijakan sudah sampai sejauh mana. Selain itu, tahap penilaian ini juga dipakai sebagai tolak ukur bagi para pembuat peraturan guna penyempurnaan lebih lanjut.

#### **A. Tipe-tipe Evaluasi**

Terdapat empat tipe evaluasi yang dikemukakan oleh Finance, diantaranya adalah:

- a. Evaluasi kecocokan (*appropriateness*), yaitu melaksanakan evaluasi apakah suatu kebijakan tetap bisa dipertahankan atau kebijakan tersebut perlu diganti dengan kebijakan yang baru;
- b. Evaluasi efektivitas, yaitu melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan tentang apakah kebijakan tersebut sudah menghasilkan hasil atau dampak sesuai dengan tujuan kebijakan;
- c. Evaluasi efisiensi, yaitu melaksanakan penilaian dengan pedoman ekonomis, yaitu sejauh mana manfaat yang diterima dibandingkan dengan sumber daya yang telah dikeluarkan;

- d. Evaluasi meta, yaitu melaksanakan penilaian terhadap tahapan penilaian itu sendiri.

Disiplin dan tahapan waktu adalah pedoman dasar dalam tahapan evaluasi. Makanya kita perlu (1) membuat aturan umum untuk melakukan penilaian, dan (2) membuat pengaturan fasilitas yang terdiri dari parameter dan indikator. Aturan umum terdiri dari empat aspek yang terdiri dari:

1. Input, merupakan bentuk saran yang diberikan kepada pelaksana kebijakan;
2. Proses, yaitu cara mentransformasikan suatu peraturan kedalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat;
3. Outputs (hasil), merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan;
4. Outcomes (dampak), merupakan dampak yang dihasilkan kepada target sasaran apakah sesuai dengan rencana kebijakan.

Sedangkan seperangkat instrumen yang mencakup parameter dan indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Input, indikator-indikatornya terdiri dari:
  - a. Sumber daya pendukung seperti Sumber Daya Manusia, biaya, sarana ataupun prasarana);
  - b. Bahan pendukung lainnya yang berupa peralatan dan teknologi.
2. Proses, indikator-indikatornya terdiri dari:
  - a. Apakah kebijakan telah dilaksanakan secara tepat sasaran atau tidak;
  - b. Tepat guna ataupun tidak;
  - c. Efisien atau tidakkah kebijakan tersebut;
3. Outputs (hasil), indikator-indikatornya terdiri dari:

- a. Ketepatan sasaran;
  - b. Besar sasaran yang diakomodir;
  - c. Banyaknya target yang ditangani;
  - d. Jumlah kelompok sasaran yang terlibat;
4. Outcomes (dampak), indikator-indikatornya terdiri dari:
- a. Ada atau tidaknya perubahan pada target kebijakan;
  - b. Seberapa besar perubahan target yang telah menerima;
  - c. Seberapa jauh perubahan yang terjadi pada target kebijakan dibandingkan dengan tujuan yang hendak diraih.

## B. Indikator Evaluasi Kebijakan

Tabel 2.1.1 Indikator Evaluasi Kebijakan

No.	Indikator	Fokus Penilaian
1	Input	a. Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan memadai? b. Berapakah SDM, uang, dan infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2	Proses	a. Bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat? b. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?
3	Outputs	a. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik? b. Berapa orang yang berhasil mengikuti program/kebijakan tersebut?
4	Outcomes	a. Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan tersebut? b. Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? c. Adakah dampak negatifnya? Seberapa jauh dampak negatif tersebut?

*Sumber: Hanif Nurcholis, Enceng, Zainul Ittihad Amin (2017:7.24)*

Dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Badjuri dan Yuwono diatas maka tahap evaluasi akan menunjukkan apakah suatu kebijakan memiliki banyak dampak positif ataupun sebaliknya, dan dari situ para pembuat ataupun pelaksana kebijakan dapat mengambil keputusan apakah suatu kebijakan dapat dilanjutkan atau harus diganti dengan kebijakan yang baru.

### 2.1.7 Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai resmi dilaksanakan tahun 2017 dan sebagai bentuk perubahan dari beras sejahtera dan telah tersebar di berbagai daerah dalam

bentuk bantuan secara non tunai dan dilakukan menggunakan e-wallet. BPNT adalah bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk non tunai dari pemerintah dan diberikan kepada KPM atau penerima bantuan guna membeli bahan pangan yang telah tersedia di e-warong ataupun agen dengan sarana kartu keluarga sejahtera (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, 2019).

Adapun tujuan dari penyelenggaraan program ini adalah: (1) mengurangi masalah pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dengan cara pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; (2) memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM; (3) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan (4) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Selain itu, adapun manfaat dari penyelenggaraan program ini yaitu: (1) meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sekaligus sebagai tata cara perlindungan sosial dan menangani kemiskinan; (2) meningkatnya transaksi non tunai; (3) meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; (4) meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan (5) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Sedangkan untuk dapat memperoleh bantuan ini masyarakat harus berada di lokasi dengan kriteria seperti: (1) tersambung dengan jaringan internet; dan (2) terdapat e-warong.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Adapun para peneliti yang memiliki minat untuk meneliti tentang Bantuan Pangan Non Tunai ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak Fadlurrohman, Soni Akhmad Nulhaqim dan Sri Sulastri dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi) volume 9 nomor 2, tahun 2019 (122-129). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna menghasilkan data

deskriptif. Sebagai hasilnya, pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dilaksanakan berdasarkan sasaran, waktu, kualitas, kuantitas seperti dalam peraturan dan tertib pengelolaan. (Fadlurrohimi et al., 2019).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Risnandar dan Aditya Wisnu Broto, berjudul Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai Di Indonesia Volume 7, Nomor 03, Mei - Agustus, Tahun 2018 (189-204) ISSN: 2089-0338. Penelitian ini memakai metode kuantitatif. Hasilnya menjabarkan jika tingkat kepuasan KPM sudah terbilang tinggi terhadap fungsi e-warong meskipun masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan KPM, penyediaan pangan yang belum optimal, dan kesejahteraan sosial dalam penyaluran program BPNT (Risnandar & Broto, 2018).
3. Penelitian yang dilakukan Benny Rachman, Adang Agustian dan Wahyudi, yang berjudul Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Volume 16 Nomor 1, Juni 2018 (1-18). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penerima bantuan pangan (KPM) berasal dari kelompok usia produktif yang merupakan lulusan sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama, dan jika berdasarkan kelompok pekerjaan, KPM yang menerima adalah buruh ataupun yang berasal dari non pertanian dengan rata-rata penghasilan Rp1,6 Juta/KPM dan memiliki jumlah keluarga 5/KK (Rachman et al., 2018).
4. Penelitian yang dilakukan M. Hidayat Panuntun Muslim, yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kuranji Kota Padang, volume 2 nomor 1, maret 2019. Penelitian dilakukan memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasilnya menjelaskan jika ditemukan faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan BPNT yaitu faktor internal berupa jumlah dan kualitas pejabat publik yang kurang memadai, dan faktor eksternal berupa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program BPNT sehingga banyak anggota KPM yang

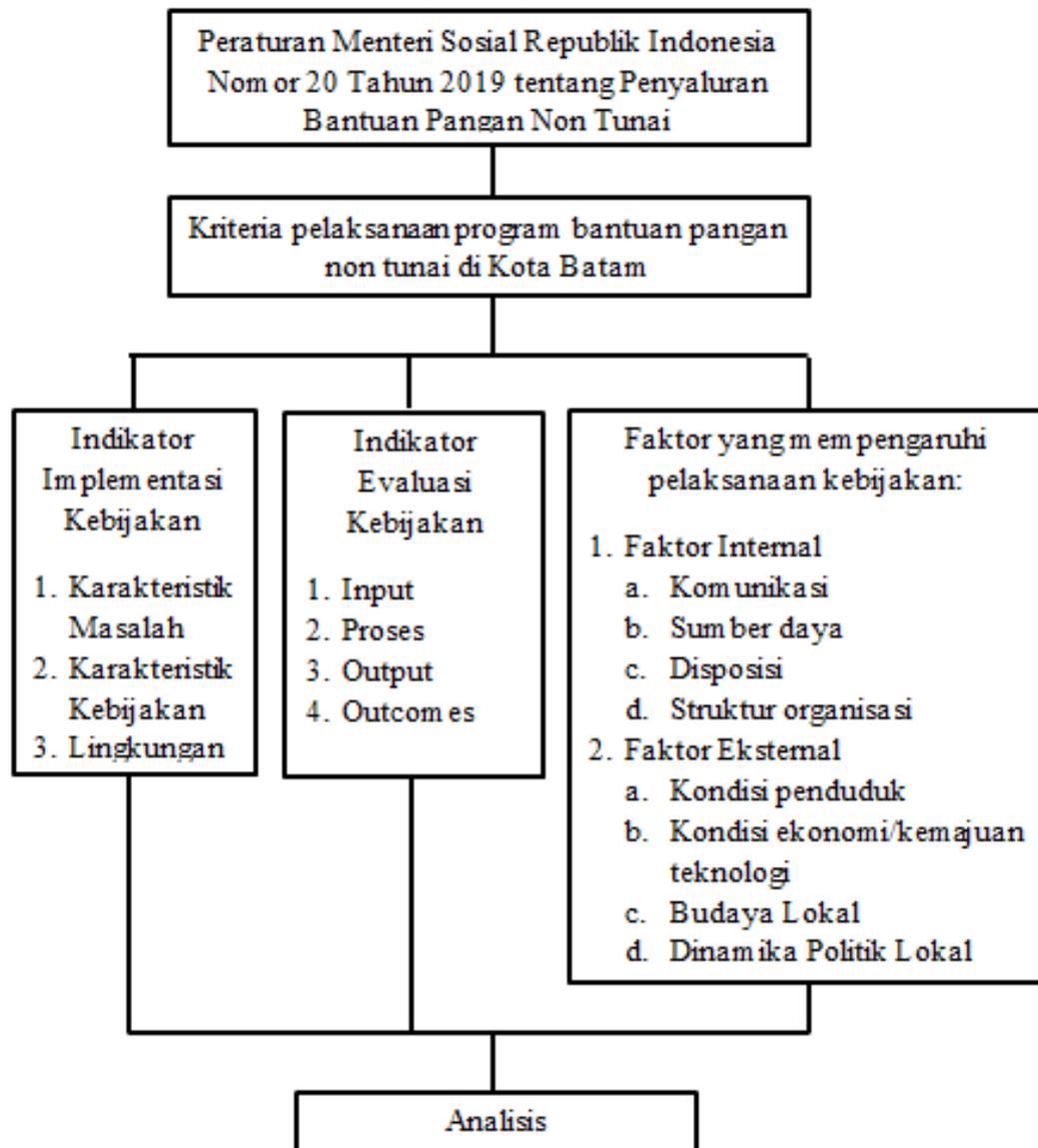
mendapatkan bantuan tetapi tidak tahu bagaimana menerima atau menggunakannya (Muslim, 2018).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Rachman Hidayat, yang berjudul Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra Dan Bantuan Pangan Non Tunai, volume 2 nomor 2, oktober 2018, P- ISSN 2579-8952. Penelitian ini menggunakan analisis data gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika program BPNT menghasilkan penyaluran bantuan pangan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan program beras sejahtera (Hidayat, 2018).
6. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Ermawati, yang berjudul Algoritma Klasifikasi C4.5 Berbasis Particle Swarm Optimization Untuk Prediksi Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Volume 8, Nomor 3, September 2019 (513 –528). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika metode algoritma C4.5 dengan particle swarm optimization (PSO) memberikan hasil yang lebih akurat dalam memprediksi penerima BPNT dibandingkan dengan metode algoritma C4.5 (Ermawati, 2019).
7. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Benny Alexandri dengan judul Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019, Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2 tahun 2019 dengan ISSN: 2622-691X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan metode yang digunakan untuk penulisan ini adalah Studi pustaka dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cakung Jakarta Timur ini dinilai sudah berjalan secara baik dan efektif sebagai salah satu upaya pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, namun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi mekanisme pelaksanaan agar berjalan lebih efektif lagi (Alexandri, 2019).

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran menurut Uma Sekarah didalam bukunya Bussiness Research (1992) adalah model konseptual mengenai teori saling terkait dengan berbagai faktor yang telah diperkirakan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian perlu disampaikan jika dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel ataupun lebih (Sugiyono, 2015, hal. 60). Dimana peneliti menjadi peraturan terkait bantuan pangan non tunai menjadi pedoman pelaksanaan program ini, dan dari pedoman tersebutlah peneliti tertari menentukan kriteria-kriteria yang harus diteliti dengan melibatkan subjek-subjek yang terlibat dalam pelaksanaan dengan menggunakan teori indikator implementasi kebijakan, indikator evaluasi kebijakan serta teori faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dan dari teori serta observasi langsung ke subjek terkait maka peneliti akan melakukan analisis guna mengetahui serta mampu menjelaskan terkait evaluasi pelaksanaan bantuan pangan non tunai di Kota Batam. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini guna menjelaskan hubungan antar variabel:

Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran





---

**Universitas Putera Batam**